

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan bentuk pemerintahan yang demokrasi. Bentuk pelaksanaan dari negara demokrasi ialah melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum disingkat pemilu menjadi salah satu syarat berjalannya sistem demokrasi dalam suatu negara. Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pelaksanaan pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia, Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang telah cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran/ pidana yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional. Pemilihan umum sistem proposional

adalah dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan imbangannya perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu.¹

Lalu Pada pemilu 1971 yang sangat membedakan dengan Pemilu 1955 adalah para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No.15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

Pasca Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol, dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971.

Pemilu 1999 Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.422

proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di dapil. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan.²

Pemilu Presiden (Pilpres) digelar secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Artinya, melalui pemilu tersebut, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pada Pilpres periode-periode sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang umum.

Pemilu presiden langsung pertama digelar pada 5 Juli 2004. Pilpres itu mempertemukan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Wiranto dan Salahuddin Wahid, lalu Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Kemudian, paslon Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Jumlah pemilih pada pilpres putaran pertama sebesar 153.320.544 orang. Dari angka itu, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 79,76 persen atau 122.293.844 orang. Dari total suara yang masuk, yang dinyatakan sah sebanyak 97,84 persen atau 119.656.868 suara. Dari lima kandidat capres dan cawapres, pasangan SBY-Jusuf

² Bawaslu Kota Batam, Sejarah Pemilu di Indonesia, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 11 November 2022

Kalla mendapat suara terbanyak, disusul oleh pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.³

Pemilihan Umum tahun 2009 merupakan masa akhir elit lama, berseminya elit baru. Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu sebelumnya. Beberapa persoalan yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya diantaranya berupa representasi wakil rakyat, proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian yang efektif, dan sebagainya, berusaha diatasi. Dalam proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik yang perlu menjadi catatan. Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan partai politik. Adapun beberapa dinamika itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya delegitimasi pemilu. Delegitimasi itu muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan otomatisasi partai-partai yang tidak lolos electoral threshold (ET) tetapi mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilu 2009. Terdapat sembilan partai yang masuk dalam katagori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Terhadap partai-partai tersebut, KPU seharusnya melakukan verifikasi keabsahan keikutsertaannya dalam pemilu. Bukannya melakukan verifikasi, KPU justru mengikutsertakan partai-partai peserta pemilu 2009, yaitu Partai Merdeka, PNUI, PSI, dan Partai Buruh. Dengan demikian, dalam pemilu 2009 terdapat peserta selundupan, dan itu

³ Fitria Chusna Farisa, *Sejarah Dimulainya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/12112831/sejarah-dimulainya-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-secara-langsung> , Diakses pada tanggal 10 November 2022

menjadikan pemilu mengalami delegitimasi karena diikuti oleh partai yang tidak melalui proses verifikasi padahal waktu untuk melakukan hal itu masih tersedia. Prinsip fairness telah ditabrak oleh KPU⁴.

Pemilihan umum 2014 menjadi pemilu ke-11 yang digelar pemerintah. Sedangkan pada tahun yang sama juga digelar pemilihan presiden secara langsung yang ke-3. Untuk pemilihan legislatif, para pemilih diberi kesempatan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak), sedangkan untuk memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu legislatif 2014 digelar pada 9 April. Khusus untuk pemungutan suara di luar negeri digelar sebelum 9 April dan hanya memilih anggota DPR.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen), mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen) sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.⁵

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia melaksanakan pemilu salah satunya pemilihan presiden (Pilpres) yang diadakan serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Jambi. Pilpres 2019 ini merupakan Pilpres keempat yang telah

⁴ *Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktori Penyelenggaraan Pemilu, <https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>, Diakses Pada tanggal 03 November 2023*

⁵ *Aryo Putranto Saptohutomo, Hasil Pemilu dan Pilpres 2014, <https://nasional.kompas.com/>, Diakses Pada tanggal 03 November 2023*

diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2004. Tujuan pemilihan presiden tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih seorang pemimpin. Ke-semuanya itu dilakukan dalam rangka mewujudkan hak politik dalam hal ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan hak pilih yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pada kenyataannya masyarakat memang sudah melaksanakan hak politiknya, namun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak melaksanakan hak politiknya untuk memilih seorang pemimpin dengan baik terutama pada saat pemilihan presiden 2019 berlangsung di Kota Jambi.

Adapun penelitian sebelum dilakukan oleh Arsiandi Dian Hapizin, Syafruddin, Dan M. Mabur Haslan dalam jurnal yang berjudul “ Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung (Studi di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur), yang mana dalam Jurnal ini untuk mendeskripsikan Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2013 di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Pringgajurang yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk turut serta dalam melakukan pencoblosan pada saat pemilu pada tahun 2013 kemarin tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik partisipan dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti pencoblosan. Meskipun masyarakat Desa

Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan akan tetapi partisipannya adalah partisipan pasif karena masyarakat ikut melakukan pencoblosan dikarenakan ingin memilih salah satu pasangan yang diusung oleh salah satu organisasi keagamaan yakni Nahdlatul Wathan.⁶

Dan yang kedua penelitian ini dilakukan oleh Ayu Lastari dalam skripsi yang berjudul “Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab Al – Munawar 13 Ulu Palembang”, yang mana dalam skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana orientasi politik dan tipe budaya politik Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang. Peneliti mengangkat judul ini dilatar belakangi oleh mayoritas masyarakat Kampung Arab Al-Munawar yang merupakan pemeluk agama Islam dan mereka merupakan satu garis keturunan, Fokus penelitian tersebut mengkaji bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Arab Al-Munawar. Budaya politik dalam konteks kajian tersebut adalah bagaimana masyarakat Kampung Arab Al-Munawar sebagai sebuah bagian dari komunitas politik melihat dan memandang kehidupan politik di Palembang. Selain itu juga penelitian ini akan mengurai perilaku, sikap dan prinsip masyarakat Kampung Arab Al-Munawar. Hasil penelitian tersebut yaitu masyarakat Kampung Arab Al-Munawar memiliki orientasi politik yang relatif tinggi terhadap sistem politik secara umum. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap politik tetapi sifatnya pasif. Walaupun mereka

⁶ Arsiandi Dian Hapizin, Syafruddin, M. Mabror Haslan, Volume 1 No. 2 Desember 2019, *Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung (Studi di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur)*, <https://jipi.unram.ac.id/index.php/jipi/article/view/20/15> , diakses pada tanggal 08 November 2022

mayoritas Islam namun dalam pemilu mereka sama sekali tidak berafiliasi pada partai Islam, mereka memilih sesuai dengan tingkat pengetahuan dan naluri mereka. Mereka berpendapat bahwa Partai Nasionalis lebih peduli terhadap kepentingan masyarakat. Budaya politik Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar dikelompokkan kedalam tipe Budaya politik Subjek/Kaula dan Partisipan karena memiliki ciri-ciri Budaya Politik Subjek/Kaula dan Partisipan itu sendiri.⁷

Selain itu, pembahasan tentang Budaya politik yang mana selalu menjadi salah satu tema ilmu politik yang sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya untuk dikaji, bukan saja karena budaya politik merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, namun karena budaya politik juga dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Dalam era globalisasi, budaya politik dalam suatu negara seringkali ambivalen dan cenderung mencair. Globalisasi juga mendorong masyarakat dunia lebih perhatian terhadap kultur masyarakat lainnya, maupun berbagai aspek perbedaan budaya.

Budaya politik mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional dan penilaian etika moral yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sikap dan tingkah laku inilah menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi di dalam sistem politik. Konsep budaya politik lazimnya dikaitkan dengan konsep negara atau

⁷ Ayu Lastari, *Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab Al – Munawar 13 Ulu Palembang*, <http://eprints.radenfatah.ac.id/2874/1/AYU%20LASTARI%20NIM.%201554300009.pdf>, diakses pada tanggal 08 November 2022

budaya-budaya nasional. Dalam hal ini, budaya politik merupakan perwujudan kembali konsep lama yang disebut dengan karakter nasional yang berisi serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatar belakangi suatu kondisi dimana terjadi peristiwa politik.⁸

Kajian tentang budaya politik selalu menarik. Selain berkaitan dengan perkembangan politik di suatu negara, budaya politik juga berhubungan dengan dinamika partisipasi politik masyarakat. Artinya, perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat (dalam konteks Indonesia) sangat memengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Partisipasi selalu menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan kerja bagi penyelenggara pemilu. Tiga kali pemilu paska-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Lalu pada 2019 tingkat partisipasi berjumlah 85,27%.⁹ Dan Daftar Pemilih Tetap sebanyak pada 2019 sebanyak 2.475.655¹⁰. Pada 2019 Kota Jambi memiliki Daftar Pemilih Tetap untuk laki-laki sebanyak 199.450 dan perempuan sebanyak 204.374 dengan jumlah total 403,824. Lalu pada Muaro Jambi memiliki Daftar

⁸ Hening Suryo, *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang* : Suatu Perbandingan. Jurnal Tranformasi I (27): 1-47. 2015

⁹ Mochammad Farisi , Rio Yusri Maulana, *Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi*, <https://repository.unja.ac.id/16952/1/jurnal%20ganaya.pdf> , Diakses pada tanggal 26 November 2022

¹⁰ JDIH.kpu.go.id, https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/477.pdf , Diakses pada tanggal 28 November 2022

Pemilih Tetap untuk laki-laki sebanyak 143.261 dan perempuan sebanyak 136.438 dengan jumlah total sebanyak 279.699.¹¹

Fokus penelitian ini akan mengkaji bagaimana budaya politik masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 dalam pemilihan presiden 2019. Budaya politik dalam konteks kajian ini adalah bagaimana masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13 sebagai sebuah bagian dari komunitas politik melihat dan memandang kehidupan politik di Kota Jambi. Selain itu juga penelitian ini akan mengurai perilaku, sikap dan prinsip masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13. Konteks politik dalam hal ini adalah mekanisme Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019, sistem Pemilu ini dijadikan alat ukur untuk melihat budaya politik masyarakat Kota Jambi.

Kota Jambi memiliki kekhasan budaya Islam yang dikenal santun dan religi. Hal ini sangat menarik dikaji ketika kita kaitkan dengan kondisi sosial politik yang terjadi sekarang ini. Mayoritas masyarakat Kota Jambi khususnya untuk Warga Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 adalah pemeluk agama Islam dan mereka merupakan satu garis keturunan. Fakta yang menarik bahwa identitas Islam masyarakat Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 tidak memberikan jaminan bahwa mereka berafiliasi atau mendukung partai dengan identitas keislamannya.

¹¹ JDIH.kpu.go.id, https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/muarojambi/data_kepkud/SK%20NO%2062%20Tentang%20Penetapan%20DPT%20Hasil%20Perbaikan%20Ketiga%20Kab%20Muaro%20Jambi%20Dalam%20Pemilihan%20Tahun%202019.pdf, Diakses pada tanggal 29 November 2022

Kota Jambi merupakan salah satu Kota yang masih kuat mempertahankan kemurnian adat istiadatnya, meskipun di sekitarnya sudah bisa dipastikan tidak lagi bisa menjaga pola hidup dan kebudayaan aslinya. Telanaipura adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Jambi, provinsi Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 50.497 jiwa dengan kepadatan 2.690 jiwa/km²¹². Kecamatan ini adalah salah satu Kecamatan terbesar di Kota Jambi. Di Kecamatan ini terdapat Kantor Gubernur Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Perpustakaan Daerah, dan Lapangan Golf. Sebagian besar kantor-kantor Pemerintah tingkat Provinsi Jambi terletak di Kecamatan Telanaipura.¹³

Modernisasi dalam lingkup masyarakat tradisional akan menimbulkan implikasi terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional bagaimanapun masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya dulu. Karena itu kelompok masyarakat seperti ini telah memiliki pola budaya tertentu, sedangkan modernisasi tentu akan membawa pola budaya baru bagi masyarakat tersebut yang mungkin berbeda dengan norma serta nilai yang lama.

Berangkat dari kondisi di atas maka saya akan memfokuskan penelitian ini tentang Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura

¹² dukcapil.kemendagri.go.id, www.dukcapil.kemendagri.go.id, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

¹³ kectelanaipura.jambikota.go.id, <https://kectelanaipura.jambikota.go.id/profil/monografi/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Dengan melakukan pendekatan Almond dan Verba yaitu pendekatan budaya politik Parokial, Kaula, dan Partisipan.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana tipe budaya politik dan orientasi Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13 dalam pemilihan presiden 2019?
- 2 Mengapa Pendidikan warga RT.13 cenderung relatif rendah akan tetapi berbudaya politik partisipan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Mengetahui tipe budaya politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada pemilihan presiden 2019
- 2 Mendeskripsikan orientasi politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada pemilihan presiden 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Bagi para mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Budaya seperti apa yang ada pada Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13 pada pemilihan presiden 2019.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar bisa sebagai informasi yaitu kelengkapan beragam data untuk masyarakat, dan juga bisa sebagai alat bantu bagi KPUD dan Bawaslu untuk perumusan kebijakan yang memiliki arah kepada Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Budaya Politik

Kajian tentang Budaya Politik menjadi sebuah kajian yang menarik untuk mengetahui budaya apa yang mendominasi politik di masyarakat kota jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya

politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik bagi masyarakat.

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai Behavioral Revolution, atau ada juga yang menamakannya dengan Behavioralism.¹⁴ Behavioral revolution terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim.

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel A. Almond, ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan diantara kalangan teoritisasi dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. Civic Culture inilah yang menurut

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 97

Gabriel Almond dan Sidney Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi.

Maka dari itu Gabriel Almond dan Sidney Verba (1984) mengklasifikasikan budaya politik dalam bentuk Orientasi Politik. Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu:

a. Orientasi kognitif,

yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara. Orientasi kognitif mengacu pada bagaimana individu memproses informasi dan berinteraksi

dengan dunia sekitar mereka melalui pemikiran, penalaran, dan persepsi.¹⁵

b. Orientasi afektif,

yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Pentingnya pemahaman terhadap orientasi afektif dalam analisis emosi dan perilaku manusia tidak bisa diabaikan, mengingat bahwa perasaan dan respons emosional yang kompleks memiliki potensi besar untuk berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti pengambilan keputusan yang kompleks, dinamika interaksi sosial yang melibatkan sejumlah individu, serta kualitas hidup secara keseluruhan yang mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan sosial. Sehingga, penguasaan terhadap konsep ini menjadi kunci untuk menggali pemahaman yang lebih dalam terkait dengan bagaimana emosi memainkan peran penting dalam pengaruhnya terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh¹⁶.

c. Orientasi evaluatif,

yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi evaluatif adalah istilah yang merujuk pada cara individu atau kelompok mengembangkan penilaian

¹⁵ Almond, A. Gabriel, *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 15

¹⁶ Almond, A. Gabriel, *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 15

atau evaluasi terhadap berbagai hal, termasuk objek, peristiwa, kebijakan, atau orang. Ini melibatkan proses penentuan nilai atau pandangan terhadap sesuatu berdasarkan kriteria atau standar tertentu.¹⁷

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisahkan tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penelitian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.¹⁸

Pada hakikatnya kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin

¹⁷ Almond, A. Gabriel, *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 15

¹⁸ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 22.

mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kita pun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain¹⁹.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem. Di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologis sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada suatu sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap, dan tingkah laku politik.²⁰

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.²¹

Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mengenai proses politik yang berlangsung

¹⁹ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 23

²⁰ 5 Ibid., h. 24.

²¹ Gabriel A. Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantraprawira, *Budaya Politik*, h. 42.

di lingkungan masyarakat itu sendiri. Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.

1.5.2 Tipe – Tipe Budaya Politik

Almond dan Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan²². Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Hasilnya adalah beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (*parochial political culture*) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat

²² Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, -terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 27.

murni merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan dalam masyarakat – masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Budaya politik parokial merujuk pada masyarakat yang cenderung apatis atau kurang tertarik dalam urusan politik. Istilah "parokial" dalam konteks ini mengacu pada pandangan sempit atau lokal yang dapat menghasilkan ketidakpedulian terhadap politik nasional atau global²³. Faktor-faktor seperti pendidikan, perubahan ekonomi, atau peristiwa politik dapat memengaruhi apakah budaya politik parokial akan berubah menjadi budaya politik yang lebih partisipatif dan peduli terhadap politik nasional atau global.

b. Budaya Politik Kaula/Subjek

Budaya politik subjek atau kaula memiliki frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Budaya politik subjek mengacu pada masyarakat yang cenderung pasif, apatis, atau kurang tertarik dalam urusan politik. Individu dalam budaya politik subjek cenderung memiliki sikap yang kurang kritis terhadap pemerintah,

²³ *Ibid.*, h. 29

tidak aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik, dan menerima otoritas pemerintah tanpa banyak pertimbangan²⁴.

c. Budaya Politik Partisipan

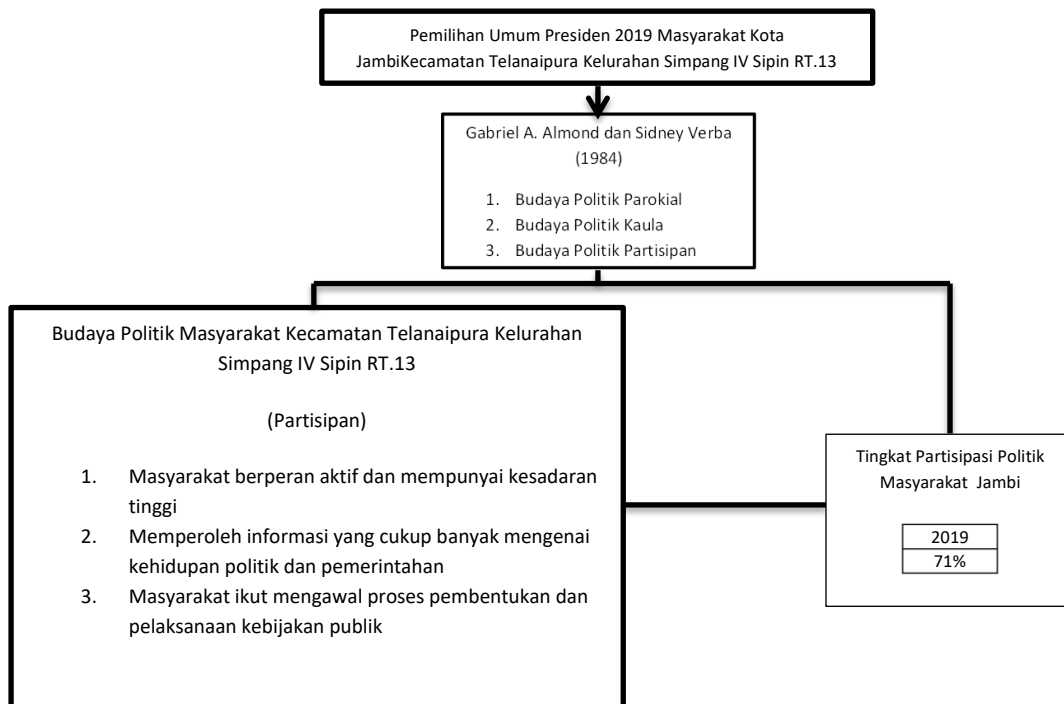
Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan masyarakat dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya²⁵. Dari penjelasan tersebut maka dapat di katakan bahwa Dalam penelitian ini, dari beberapa Budaya politik yang telah disebutkan oleh Almond dan Verba, peneliti hanya ingin berfokus Budaya Politik yang ada pada masyarakat Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penulis dalam rangka menyusun juga menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu diperlukan suatu kerangka pikir yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Berikut ini kerangka pikir pada penelitian ini.

²⁴ *Ibid.*, h. 30

²⁵ *Ibid.*, h. 29-32



Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin mengetahui Budaya Politik apa yang terjadi pada Pemilihan Presiden Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 tahun 2019. Yang mana akan dibahas menggunakan teori Gabriel A. Almond dan Sidney Verba untuk menentukan pada masyarakat kota jambi. Dengan menggunakan ketiga Budaya Politik tersebut di dalam penelitian ini, akan dapat diketahui budaya politik masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada Pemilihan Presiden 2019.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjarangan

informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif penulis anggap tepat untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat²⁶. Penulis beranggapan melalui metode penelitian kualitatif, akan membawa penulis mengetahui konflik secara lebih kompleks, mendalam dan juga menyeluruh yang pada akhirnya didapatkan suatu penjelasan yang rinci dari suatu permasalahan yang diteliti, terkait dengan Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT. 13 Pada Pemilihan Presiden 2019.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau disebut riset lapangan dikatakan demikian karena objeknya adalah Wawancara. Riset lapangan ini dalam rangka untuk mencari data yang valid agar dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang penulis maksudkan serta pembahasan dan penganalisisan yang sistematis²⁷.

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

²⁶ Bogdan dan Taylor, Metodologi Penelitian dikutip Moleong, *Metodelogi Penelitian*, h.4.

²⁷ Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berpengaruh pada Informan secara utuh.²⁸

Penelitian ini mencari data dengan cara membaca dan memahami buku, jurnal maupun skripsi sebelumnya yang mana bisa menjadi dasar pembuatan penelitian ini, sekaligus digunakan dalam penganalisisan yang berkaitan dengan permasalahan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi dan waktu yang tepat sangatlah penting dalam melakukan penelitian yang sangat mendalam agar mendapatkan data yang terpercaya dan apa adanya untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 dikarenakan partisipasi Warga RT.13 berperan aktif dalam sistem politik yang terjadi pada Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada Pemilihan Presiden 2019.

²⁸ Lexy.J.Moeloeng, “*Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) h. 4

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangar dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini:

1. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi, jurnal dan buku.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13 pada Pemilihan Presiden 2019. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Pengamat Politik
- 2 Tokoh Masyarakat
- 3 Anak Milenial
- 4 KPU Kota Jambi

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan partisipan.

2. Studi pustaka

yaitu pengambilan data dengan membaca literature atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan keterkaitan Budaya Politik di Kota Jambi Kecamatan Telanaipura Kelurahan Simpang IV Sipin RT.13.

1.7.7 Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-

mata menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk dimasukkan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa²⁹.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca. Sajian data penulis berasal dari hasil observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan cara memeriksa, mengatur serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.³⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan kategori berbeda, maka peneliti pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil pendeskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.³¹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 231

³⁰ *Ibid.*, h. 231.

³¹ *Ibid.*, h. 231

1.7.8 Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai konflik yang diteliti maupun konteks dimana konflik itu muncul. Dalam penelitian ini, terdapat dua triangulasi data diantaranya:

1. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
3. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

